

**ANALISIS PERAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI KOTA BANDUNG
(STUDI KASUS DI BANK BRI KCP ASIA-AFRIKA)**

DRAF SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Program Perkuliahan S1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Disusun Oleh :

Evi Juniarti

124030064



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**

BANDUNG

2016

**ANALISIS PERAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI KOTA BANDUNG
(STUDI KASUS BANK BRI KCP ASIA-AFRIKA)**

DRAFT SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Bandung, September 2016

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. H. R. Abdul Maqin, SE.,MP.

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi

Dr. Atang Hermawan,SE.,MSIE.,Ak.

Dr. H. Tete Saepudin,SE.,MSi

ABSTRAKSI

Peningkatan kinerja UMKM dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Kurangnya modal yang dimiliki pengusaha UMKM merupakan tantangan yang dihadapi saat ini. Pengusaha UMKM kesulitan untuk memperoleh modal pinjaman karena tidak memiliki asset yang cukup untuk memenuhi persyaratan pinjaman di bank. Guna menanggulangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program kredit untuk UMKM dengan penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diharapkan mampu membantu pengusaha

UMKM untuk menambah modal usaha, sehingga kinerja usaha dapat meningkat. Begitu halnya dengan permasalahan yang dihadapi usaha mikro di Kota Bandung, permodalan menjadi hambatan untuk menjalankan usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Cara pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan kuisioner. Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan alat analisis untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan program *Eviews*.

Peran kredit usaha rakyat terhadap pengembangan usaha UMKM di kota bandung dengan uji statistika secara parsial modal sendiri dan harga bahan baku mempengaruhi penjualan UMKM secara signifikan, namun modal kredit usaha rakyat memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan UMKM.

Kata Kunci : Usaha Mikro, Kredit Usaha Rakyat, Penjualan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Menurut Wahyuni, dkk (2005:91) hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain :

1. Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini.
2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang.
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja.
4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Terbukti di saat krisis ekonomi melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi banyak sektor yang mengalami pertumbuhan pada *output* yang menurun. Setidaknya ada dua faktor yang memainkan peran sangat penting pada saat itu untuk mengurangi efek-efek negatif terhadap kemiskinan. Pertama, pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal banyak menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari sektor formal dan ternyata memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja. Kedua, banyak program pemerintah yang ada untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa program-program pemerintah tersebut adalah Program Nasional bagi Keluarga Harapan (PKH)

yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, Program Nasional untuk Penguatan Masyarakat (PNPM) yang memberi penekanan pada pengembangan usaha (Tambunan, 2012).

UMKM memiliki beberapa peran di Indonesia, yakni sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagai penyedia kesempatan kerja, sebagai pelaku dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, sebagai pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas serta adanya keterkaitan dengan kegiatan perusahaan, selain itu UMK dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas, dan dapat mereduksi ketimpangan pendapatan (Urata dalam Sulistyastuti, 2004).

UMKM merupakan kelompok usaha yang beroperasi di sektor informal dan padat karya sehingga dinilai mempunyai peran strategis sebagai sumber pencipta lapangan kerja. Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997-1998 berdampak pada besarnya jumlah pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kebangkrutan. Akibat belum adanya sistem jaminan sosial yang baik terutama sistem pemberi tunjangan pengangguran yang ada di negara ini, maka banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi mereka yang menganggur untuk bekerja di sektor informal maupun membuka usaha sendiri di sektor informal (Setiawan, 2011).

Sektor UMKM pada dasarnya sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya

barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor :

- (1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;
- (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- (3) Industri Pengolahan;
- (4) Pengangkutan dan Komunikasi;
- (5) Jasa-jasa (www.depkop.go.id).

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Menurut Partomo dan Soejodono (2004) keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Yang menjadikan UMKM terus bertahan disaat krisis ekonomi adalah karena, pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal

sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga bank naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri. Ketiga, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja di sektor formal sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran, pada akhirnya menyebabkan para penganggur memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah UMKM.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan

Dalam perannya di perekonomian Indonesia, UMKM mengalami perkembangan baik dalam jumlah unit usaha yang bertambah, tenaga kerja yang bertambah dan

kontribusinya terhadap PDB atas harga konstan yang bertambah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung
Tahun 2013-2014

Indikator	2013	2014	Pertumbuhan
Unit usaha (unit)	37.550.557	40.421.177	7.6%
Tenaga Kerja (Orang)	10.849.491	11.892.041	9.6%
PDRB atas harga Konstan (Miliar)	128.988.567	183.911.063	4.2%

Sumber : www.bandungkota.bps.go.id/

Berdasarkan table 1.1 bahwa UMKM mengalami pertumbuhan dilihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah unit usaha UMKM mengalami peningkatan dari 37.550.557 unit usaha pada tahun 2013 meningkat hingga menjadi 40.421.177 unit usaha pada tahun 2014 dengan nilai pertumbuhan sebesar 7.6%. Dalam jumlah tenaga kerja yang dapat terserap oleh UMKM juga mengalami peningkatan sebesar 11.892.041 orang pada tahun 2014 yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 10.849.491 orang dengan nilai penyerapan tenaga kerja sebesar 9.6%. Sedangkan untuk perannya UMKM terhadap PDRB kota Bandung atas harga konstan dimana mengalami pertumbuhan dari 128.988.567 pada tahun 2013 dan mengalami

peningkatan sebesar 183.911.063 pada tahun 2014 dengan nilai perkembangan PDB sebesar 4,2%.

Begitupun di Jawa Barat, UMKM memiliki peran yang penting terhadap perekonomian. UMKM di Jawa Barat merupakan pelaku ekonomi yang cukup dominan dengan jumlah unit usaha mencapai 9,1 juta atau sekitar 6,17 % dari total pelaku UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, UMKM memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.007.695 orang. Dengan banyaknya unit usaha dan penyerapan tenaga kerja yang diberikan oleh UMKM di Jawa Barat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Jawa Barat yang mencapai 55,54 %. (Dinas KUMKM Jabar)

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mempunyai peranan yang penting mengingat UMKM lebih bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun demikian keterbatasan yang

dimiliki UMKM baik secara internal maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi; dan keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank. Dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan *asset* dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal,

agunan/jaminan, dan prospek dari debitur. Dalam dunia perbankan, kelima factor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “*The Five Of Credit Analysis*” atau prinsip 5C’ (*Character, Capacitiy, Capital, Collateral Dan Condition Of Economic*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkanannya tumbuh menjadi kredit macet. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan

yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan UMKM dan ikut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

Untuk tujuan ini, pemerintah telah menyuntikkan modal sebesar Rp 1,45 triliun kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia

(Askrindo) yang digunakan sebagai jaminan kredit sebesar 70% atas kredit yang disalurkan dengan menggunakan dana bank-bank pelaksana. KUR ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 % dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur yang disalurkan melalui enam bank pelaksana, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.

Dalam realisasinya penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dilaksanakan dapat terlihat bahwa realisasi Kredit Usaha rakyat menurut sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada table 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014

No	Sektor Ekonomi	Total			
		Plafon	Outstanding	%	Debitur
		(Rp Juta)	(Rp Juta)		(Orang)
1	Pertanian	30.170.244	10.791.201	6.29%	1.978.443
2	Perikanan	920.787	183.009	0.11%	16.489
3	Pertambangan	144.086	58.637	0.03%	5.063
4	Industri pengolahan	4.807.481	1.704.798	0.99%	266.701
5	Listrik, gas dan air	92.707	40.192	0.02%	3.294
6	Konstruksi	2.175.690	495.243	0.29%	13.187
7	Perdagangan	97.245.002	29.485.717	17.17%	7.944.824
8	Penyediaan akomodasi	1.234.004	322.644	0.19%	49.016
9	Transportasi	2.267.298	906.167	0.53%	64.268
10	Perantara keuangan	1.198.628	302.270	0.18%	8.025
11	usaha persewaan	8.446.303	3.315.514	1.93%	458.804
12	Adm. Pemerintahan	59.396	33.776	0.02%	3.441
13	Jasa pendidikan	98.106	23.045	0.01%	758
14	Jasa kesehatan	422.167	98.225	0.06%	3.468
15	Jasa kemasyarakatan	4.692.546	942.000	0.55%	116.861
16	Jasa perorangan	153.383	31.785	0.02%	1.138
17	Badan internasional	75	-	0.00%	1
18	Lainnya	17.551.033	1.654.465	0.96%	1.187.924
Total		171.678.936	50.388.687	29.35%	12.121.706

Sumber : *www.Bank Indonesia.go.id*

Dilihat dari sisi sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran disektor ini mencapai Rp. 97,2 triliun dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 171 triliun dengan jumlah debitur UMKM sebesar 7,9 juta debitur. Sektor pertanian menjadi sektor kedua yang terbesar menyerap KUR dari bank pelaksana yaitu sebesar Rp. 30,1 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,9 juta debitur. Dalam hal ini sektor perdagangan, dan pertanian merupakan dua sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yang merupakan usaha padat karya dengan barang-barang yang dihasilkan merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Dari persentase total Plafon per Outstanding dapat dilihat bahwa ada tiga sektor utama yang memiliki persentase tertinggi yaitu sektor perdagangan yang memiliki persentase terbesar dengan nilai 17,17%, kemudian nilai persentase tersebar kedua ada pada sektor pertanian dengan nilai persentase 6,29% dan ketiga sektor usaha persewaan dengan nilai persentase 1,93%. Dan ada dua sektor yang memiliki persentase terkecil yaitu sektor badan internasional dengan nilai persentase sebesar 0,00% kemudian diikuti dengan sektor jasa pendidikan yang memiliki nilai sebesar 0,01%. Dari data diatas terlihat juga nilai rata-rata 29,35% dimana nilai ini belum mencapai setengahnya dari jumlah Plafon yang disediakan oleh bank. Dari data itu dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara sektor-sektor yang ada. Dimana terdapat nilai 17,17% untuk sektor perdagangan dan nilai 0,00% terhadap sektor badan internasional.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penyaluran kredit usaha rakyat terkonsentrasi pada dua sektor yaitu perdagangan dan pertanian kedua sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar. Penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut

menjadikan kedua sektor ini sebagai jenis usaha yang banyak dipilih oleh UMKM. Dimana dari data tersebut terlihat bahwa penyaluran kredit usaha rakyat tidak merata yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tumbuh secara tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini mengakibatkan kesenjangan antara sektor perdagangan, sektor pertanian terhadap sektor-sektor yang lainnya.

Bagitu juga terhadap pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang di terapkan oleh Bank-bank utusan pemerintah penyalurannya hanya terkonsentrasi terhadap dua sektor tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa sektor yang lain tidak dapat berkembang dan meningkat.

Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan plafond masing-masing Rp. 28,2 triliun dan Rp. 22,7 triliun. Jawa Tengah masih merupakan provinsi terbesar yang menyerap KUR dari Bank Pelaksana. Diharapkan dengan adanya BPD dapat meningkatkan penyaluran KUR di luar pulau Jawa. (www.komite-kur.com)

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan lalu lintas perekonomian yang begitu banyak jelas memiliki potensi yang besar bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah kota Bandung telah memasukkan UMKM sebagai salah satu prioritas dalam program kerja pembangunan Ekonominya. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bandung mencatat jumlahpelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) sekitar 3000 unit, masih jauh dibandingkan dengan total penduduk kota Bnadung yang hamper mencapai 2,5 juta orang (bandung.bisnis.com)

Manajer Badan Promosi Pengelolaan Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kadin Kota Bandung Bambang Tris Bintor mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pembinaan melalui beberapa program unggulan. Saat ini sedang fokus menggalakan program inkubasi bisnis yang diharapkan bisa menumbuhkan kembangkan pelaku UMKM dikota Bandung. (bandung.bisnis.com)

Berkaitan dengan hal tersebut , modal masih menjadi masalah pokok dalam pengembangan UMKM. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada usaha mikro,kecil dan menengah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha. Sehingga dengan demikian penulis mengangkat topik dengan judul **“ANALISIS PERAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA UMKM KOTA BANDUNG (Studi Kasus Bank BRI)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana skema dalam proses penganjuran Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Kcp Asia Afrika Kota Bandung?

2. Bagaimana Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Penjualan yang dihasilkan UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui skema dalam proses pengajuan Kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI Kcp Asia Afrika Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap penjualan Usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis atau Akademis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut ;

1. Sebagai pengaplikasian secara teori untuk kebijakan yang real dalam bidang Usaha UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran Kredit dalam pengembangan Usaha UMKM

1.4.2 Kegunaan Praktis atau Empiris

- 1 Untuk memeberikan Kontribusi kepada Usaha UMKM dalam menggunakan Kredit yang diperoleh untuk pengembangan usaha
- 2 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa fakultas ekonomi khususnya ekonomi pembangaunan dalam rangka memperkaya referensi bahan penelitian dan sumber bacaan,sehingga dapat membantu dalam memperlancar penelitiannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berupa teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah peran kredit usaha rakyat terhadap pengembangan umkm, implikasi bagi pelaku usaha. Pada kajian pustaka ini dimulai dari pengertian secara umum, sampai pada pengertian yang fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2.1.1 Teori Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja. Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dan output. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk (*form utility*), memindahkan tempat (*place utility*), dan menyimpan (*store utility*). Hubungan teknis yang dimaksud adalah bahwa produksi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan faktor produksi yang dimaksud. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam rumus, yaitu seperti berikut:

$$Q = f(K, L)$$

Faktor-faktor produksi antara lain adalah manusia (*labor* = L), *Capital* (uang atau alat modal seperti mesin = M). Bila faktor produksi tidak ada maka tidak ada juga produksi. Produksi yang dihasilkan tanpa penggunaan teknologi, modal dan manusia disebut produksi alami, yaitu produksi yang dilakukan oleh proses alam, sedangkan produksi yang dilakukan dengan menggunakan modal, teknologi dan manusia disebut produksi rekayasa.

Produksi alami bersifat eksternal, efisiensi dan efektifitasnya tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga kelebihan atau kekurangan adalah merupakan hal yang harus diterima oleh pemakai. Namun produksi yang paling utama adalah manusia dan tanah (SDA).

Kebutuhan produsen adalah bagaimana menghasilkan barang dengan menggunakan biaya yang relative kecil untuk mendapatkan output yang relative besar (memuaskan).

Dimana dalam penelitian ini teori produksi yang dimaksud merupakan

$$Q = F (M_s, M_k, H_{bb})$$

Faktor produksi yang dimaksud merupakan (M_s) Modal sendiri yang dimiliki oleh UMKM, (M_k) modal kredit yang diperoleh oleh UMKM, dan (H_{bb}) harga bahan baku yang digunakan oleh UMKM untuk produksi penghasilan.

➤ **Hubungan Antara Produk total, Produk Rata-Rata dan Produk Marginal**

Produk Total (*total product*) adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marjinal (*marginal product*) adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi.

Produksi rata-rata (*average product*) adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Rumusannya sebagai berikut :

$$TP = f (K,L)$$

Dimana : TP = produksi total

K = barang modal (yang dianggap konstan)

L = tenaga kerja/ buruh

Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan nol.

$$MP = TP' = \Delta TP / \Delta L$$

Dimana : MP = produksi marjinal

Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama $MP > 0$. Jika MP sudah < 0 , penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya Hukum Penambahan Hasil Yang Semakin Menurun atau *The Law of Diminishing Return*.

$$AP = TP / L$$

Dimana AP = produksi rata-rata

AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 ($AP = 0$). Dengan penjelasan matematis, AP akan maksimum tercapai pada saat $AP = MP$, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum.

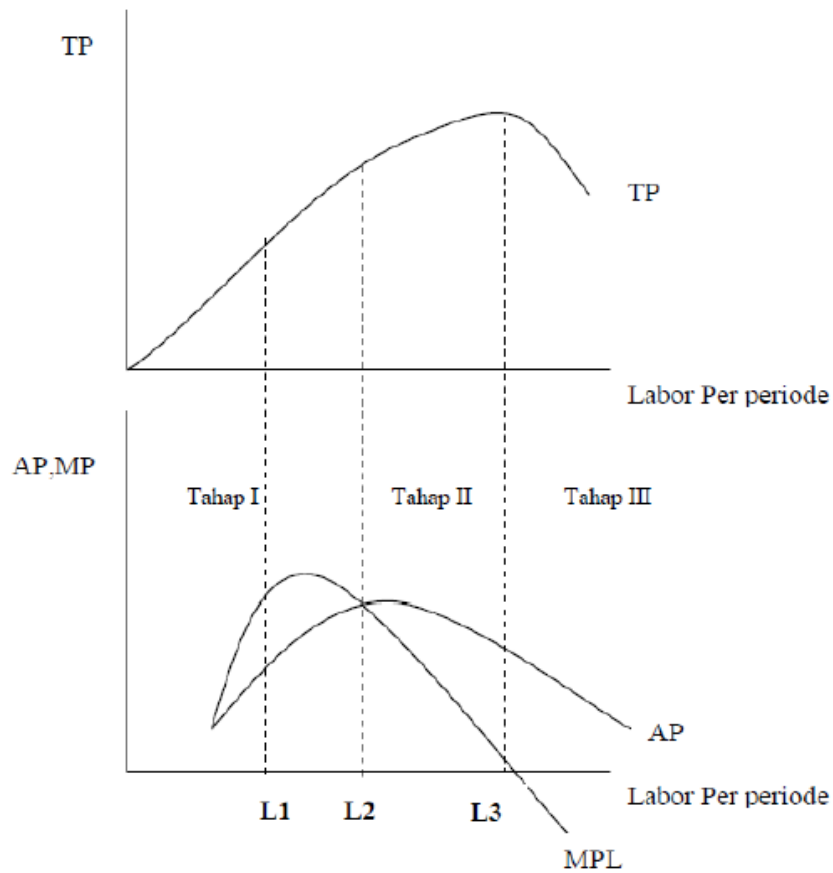
Hubungan Antara Produk total, Produk Rata-Rata dan Produk Marginal, Kurva produk marginal dan produk rata-rata diturunkan dari kurva produk total Sehingga bentuk keduanya akan selalu mengikuti bentuk kurva produk total. Apabila dengan

adanya teknologi, kurva produk total dari suatu produksi berubah maka secara otomatis kurva produk marginal dan produk rata-rata juga berubah.

➤ **Produksi Jangka Pendek**

Jangka pendek (*short run*) mengacu pada jangka waktu yang mana satu atau lebih faktor produksi tidak bisa diubah. Dengan kata lain, dalam jangka pendek paling tidak terdapat satu faktor yang tidak dapat divariasikan, seperti sebuah faktor yang disebut input tetap (*fixed input*).

Dalam gambar di bawah ini terlihat hubungan total produksi, produksi marginal dan produksi rata – rata terdapat pada 3 tahapan. Tahap I menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata – rata dan produksi marginal. Tahap II produksi total terus meningkat sampai produksi optimum sedangkan produksi rata – rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap III penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata – rata, sedangkan produksi marginal negatif. Dibawah ini pada gambar 2.1 merupakan kurva hubungan total produksi, produksi marginal dan produksi rata – rata :



Gambar 2.1

Kurva Total Produksi, Produksi Marginal Dan Produksi Rata – Rata

2.1.2 Pengertian Bank

Ada beberapa macam pengertian bank menurut para ahli, diantaranya yaitu: Menurut Thomas Suyatno Bank adalah “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut Very Stuart Bank adalah “Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau

dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperederkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”

Menurut A. Abdurahman bank adalah “Suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”.

Pengertian Bank menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Perbankan Indonesia yaitu: “Bank adalah suatu badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari dan menyalurkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, bank dapat diartikan sebagai berikut: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Bank Umum

➤ Tugas Bank

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
 - Penetapan tingkat diskonto

- Penetapan cadangan wajib minimum dan

- Pengaturan kredit dan pembiayaan

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

c. Mengatur dan mengawasi bank

➤ **Fungsi Bank**

Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)
4. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. yang memerlukan dana segar

untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

5. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
6. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development dan agen of services.

a) Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini

semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

b) Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.4 Pengertian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003 : 163). Berdasarkan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 114). Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

a. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 59) :

1. Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2. Agunan

Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank.

3. Jangka Waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.

4. Risiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban bank.

5. Bunga Bank

Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

6. Kesepakatan

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

b. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000: 61) Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu.

Analisis kredit meliputi:

- a. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah;
- b. Prospek usaha yang akan dibiayai;
- c. Jaminan yang diberikan
- d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 6C(Martono, 2002:57). Pada dasarnya konsep 6C ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 6C tersebut antara lain adalah :

1 Character

Penilaian character ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur

2 Capacity

Penilaian capacity untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

3 Capital

Penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.

4 Collateral

Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas collateral yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

5 Condition of Economy

Pada prinsip condition(kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

6 Constraint

Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah constraint ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.

Selain penilaian berdasarkan konsep 6C , terdapat juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

- a. Aspek Pemasaran
- b. Aspek Teknis
- c. Aspek Manajemen
- d. Aspek Yuridis
- e. Aspek Sosial Ekonomi

2.1.5 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

a. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia) :

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan :
 1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID)

pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah

2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
 3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
 2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 1213% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya sebesar 22 % menjadi 20-21%

efektif per tahun atau setara dengan 10-10,5% flat per tahun. Untuk tingkat bunga KUR ritel dari 14 % menjadi 12-13% efektif per tahun atau setara dengan 6-6,5% per tahun (www.vibiznewz.com). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Beberapa Defenisi dan Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM yaitu usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling

banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp. 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
- e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

b. Beberapa Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Hubeis (2009: 4-6) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu :

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMK. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b. Keterbatasan Finansial

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMK di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMK.

c. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Penulis	Hasil
1	Efektifitas program kredit usaha rakyat (kur) dalam pengembangan usaha mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero cabang Di penogoro	Sandi Whisnu Aditya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro memperoleh nilai 3,93 yang berada pada interval 3,41–4,2 masuk kategori efektif. Sementara prosentase efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro mencapai 78%. Namun berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan seperti pada indikator Tujuan program, yaitu tidak tepatnya sasaran program. Indikator Sosialisasi program menunjukkan bahwa masih kurangnya kompetensi petugas serta syarat pengurusan program masih sulit. Kemudian pada Indikator Pemantauan program, yaitu tidak sesuai pelaksanaan program dengan prosedur yang ditentukan
2	Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan UMKM di kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	Dewi Angraini Syahrir Hakim Nasution	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal KUR yang signifikan bagi pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan . Ini

			<p>dapat dilihat oleh hasil analisis model estimasi , dapat dilihat bahwa : $t^* > t - \text{table}$ (41 11 > 1,669013) . Dengan demikian H_0 diterima , artinya modal KUR dampak signifikan atau signifikan terhadap laba pengusaha UMKM pada tingkat kepercayaan 95 % . Dan faktor yang paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk mengambil atau gunakan Usaha Rakyat Cred itu (KUR) di BRI suku bunga kredit lebih rendah 37,31 % diikuti oleh 29,85 % direkomendasikan oleh seorang teman , mudah administrasi 17,91 % , jangka waktu pelunasan lagi oleh 7.46 % dan pelayanan yang baik pada 7.46 %</p>
3	<p>Pengaruh program kredit usaha rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat di desa teluk panji kecamatan kampong rakyat kabupaten lanuhan batu selatan</p>	<p>Frenky Tanni Wijaya</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat memiliki pengaruh terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Panji. Nilai R-Square menunjukkan pengaruh sebesar 0,079 atau 7,9%. Hasil uji t dan uji F penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan memberikan pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Pengaruh dilihat berdasarkan kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan</p>
4.	<p>Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) periode 2009-2011</p>	<p>Harera angga kusuma</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap KUR, SBI berpengaruh negatif terhadap penyaluran KUR, PDB berpengaruh negatif terhadap KUR, NPL tidak</p>

			berpengaruh terhadap KUR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap KUR. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Perubahan KUR adalah PDB. Sedangkan KUR mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu Inflasi, SBI, PDB, NPL dan CAR sebesar 49,6%.
5	Peranan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan umk di kecamatan gebang kabupaten langkat (studi kasus BRI kecamatan gebang)	Ari Syofwan	Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ini terlihat dari beberapa indikator seperti peningkatan omset produksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Gebang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kementerian Koperasi dan UMKM menambah jumlah bank penyalur KUR guna memperlancar dan mempermudah para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan bantuan berupa KUR diharapkan masyarakat mampu mandiri untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan melihat bagaimana perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat KUR.

Modal awal merupakan modal pertama yang digunakan UMKM untuk memulai usaha dimana banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha dengan modal yang dimiliki. UMKM pada dasarnya sulit mengembangkan usahanya karena sulitnya memperoleh modal tambahan untuk meningkatkan usaha.

Modal kredit usaha rakyat adalah bantuan kredit modal yang dikhususkan untuk UMKM dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhiono, dimana kredit modal ini ditujukan untuk umkm yang kesulitan dalam memperoleh bantuan modal. Dengan adanya bantuan modal ini UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan meningkatkan jumlah penjualan. Penjualan berhubungan sangat erat terhadap modal yang dimiliki oleh UMKM dimana jika modal yang dimiliki rendah maka penjual akan rendah dan begitu sebaliknya jika modal yang diperoleh UMKM tinggi maka jumlah produk yang dapat dijual akan tinggi.

Dengan meningkatnya penjualan atau meningkatnya permintaan akan suatu barang maka akan menambah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja bergantung pada jumlah penjualan yang barang. Dalam hal ini jika UMKM memperoleh modal tambahan maka akan dapat mengembangkan usaha dilihat dari peningkatan penjualan dan penambahan tenaga kerja.

➤ **Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Penjualan UMKM**

Modal awal merupakan hal penting dalam memulai usaha dan modal awal juga menentukan penjualan produk yang akan dihasilkan. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal awal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Dimana modal tersebut akan menjadi titik ukur berapa besar pertumbuhan penjualan yang akan dihasilkan oleh pengusaha. Hasil penelitian dari **Dewi Anggraini(2012)** menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari modal awal terhadap penjualan

umkm. Apabila modal yang dimiliki oleh umkm besar maka penjualan yang akan dihasilkan oleh umkm tersebut juga akan besar dan begitu sebaliknya.

➤ **Pengaruh Modal Kredit Usaha Rakyat terhadap Penjualan UMKM**

Modal kredit seringkali digunakan sebagai modal bantuan yang diperoleh umkm dimana modal ini dapat digunakan oleh umkm dalam pengembangan usaha atau peningkatan penjualan yang akan dilakukan oleh umkm. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan UMKM dan ikut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

. Kohler seperti dikutip **Mulyono (2001:9)** mengatakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada satu jangka waktu yang disepakati. Serta penelitian yang dilakukan oleh **Ari Syofwan (2012)** mengenai “Peranan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan umk di kecamatan gebang kabupaten langkat (studi kasus BRI kecamatan gebang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap Usaha

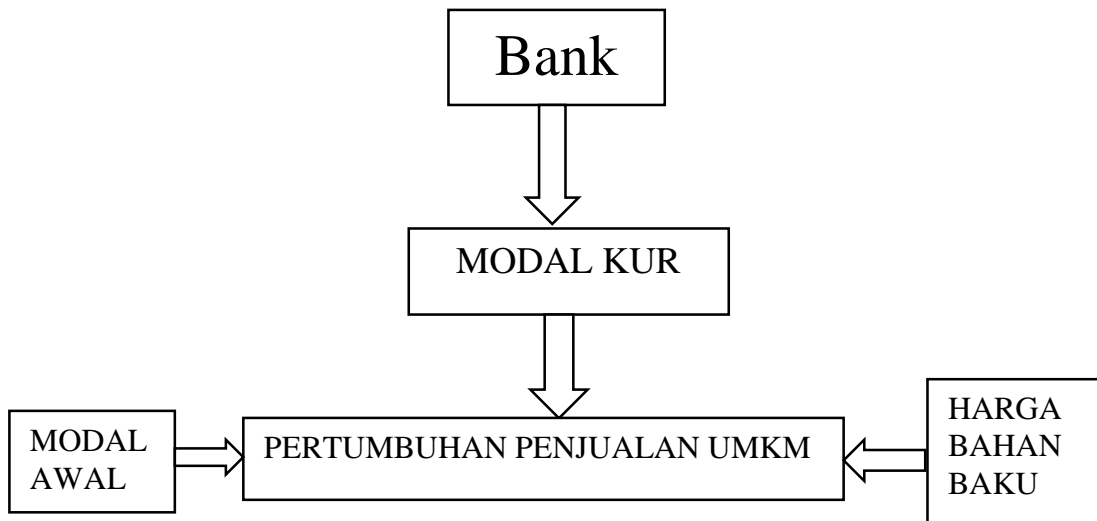
Mikro dan Kecil (UMK), ini terlihat dari beberapa indikator seperti peningkatan omset produksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Gebang.

➤ **Pengaruh harga bahan baku terhadap penjualan UMKM**

Salah Satu faktor yang mempunyai kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya, dimana biaya merupakan salah satu faktor internal yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pengusaha. Biaya memberikan batas bawah suatu harga jual harus ditentukan. Harga jual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, dengan dasar ada keseimbangan antara alasan dalam menetapkan harga jual dengan kualitas produksinya.

Perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dengan benar, dapat memberikan gambaran bagi pengusaha dalam membuat keputusan terutama mengenai penetapan harga jual. Kecenderungan tingginya harga pokok produksi maka harga jual pun akan meningkat. Harga jual yang ditetapkan diharapkan mampu mendatangkan peningkatan penjualan yang menghasilkan laba bagi pengusaha.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran KUR dari Bank BRI Kcp Asia afrika yang diberikan kepada UMKM termasuk usaha mikro yang membutuhkan pinjaman sebagai modal kemudian dari usaha mikro dilihat bagaimana perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah adanya KUR ditinjau dari penjualan. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis sementara yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut :

- Modal Awal, Modal Kredit, dan harga bahan baku baik secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan penjualan UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, Darmodar N. 1995 *Basic Econometrics* (3rd edition). Singapore: McGraw-hill
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono .2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Salvatore, Dominick. *Teori Mikro Ekonomi : Edisi Keempat*. 2002. Erlangga : Jakarta
- Sugiarto, dkk. *Mikro Ekonomi : Sebuah Kajian Komprehensif*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H 2009. *Umkm di Indonesia*. 2009. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta Erlangga
- Sukirno, Sodono. 2005. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Whisnu, Sandi 2011. *Jurnal efektifitas program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro PT. Bank BRI persero Cabang Di ponogoro*
- Anggraini, dewi 2012. *Jurnal Peran kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pengembangan usaha UMKM kota Medan (studi Kasus Bank BRI)*
- Wijaya, Frenky 2010. *Jurnal Pengaruh program kredit uasaha rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat di desa teluk panji kecamatan kampong rakyat kabupaten lanuhan batu selatan*
- Kusuma, angga 2012. *Jurnal Analisis factor-factor yang mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) periode 2009-2010*
- Syofwan, Ari 2012. *Jurnal peran kredit usaha rakyat terhadap pengembangan umk di kecamatan gebang kabupaten langkat (studi kasus BRI kecamatan gebang)*
- [www.depkop.go](http://www.depkop.go.id) (tanggal 20 April 2016, Pukul 15:30)
- www.bri.co.id (tanggal 13 Mei 2016, Pukul 13.00)
- www.bankindonesiaindonesia.com (tanggal 13 Mei 2016, Pukul 15.00)
- <http://jabar.bps.go.id/> (tanggal 02 Juni 2016, Pukul 10.00)
- <https://bandungkota.bps.go.id/> (tanggal 02 Juni 2016, Pukul 13.00)